

HASIL SELEKSI PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI PERIODE SEPTEMBER 2026
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

No.	NIM	Nama	Semester	Kelas	Judul Skripsi	Jenis Penelitian	Dosen Pembimbing	Hasil Seleksi oleh Tim	Hasil Seleksi oleh Tim
1	220202110104	Najla Anisa	IX	Reguler	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH BERDASARKAN PRINSIP KOPERASI KEMANDIRIAN DENGAN PASAL 5 UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 (Studi kasus di desa Pohgahit)	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris	Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.	Diterima	Diterima
2	230202110099	Abimanyu Ferdiansyah	VII	Reguler	AKIBAT HUKUM KETIDAKPATUHAN PELAPORAN KEPEMILIKAN MANFAAT KORPORASI TERHADAP STATUS KEABSAHAN BADAN HUKUM (STUDI DI DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM JAWA TIMUR)	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris	Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.	DITERIMA DENGAN REVISI, pertahankan isu BO-nya, tetapi perjelas novelty pasca-Permenkum 2/2025, koreksi lokus penelitian, dan jangan menjadikan "keabsahan badan hukum" sebagai asumsi sebelum dibuktikan... saran perbaikan judul "Akibat Hukum Ketidakpatuhan Pelaporan Pemilik Manfaat terhadap Kedudukan Badan Hukum Perseroan Terbatas Pasca-Perkenkum Nomor 2 Tahun 2025 (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur)"	Diterima
3	230202110019	Nisa Dian Islamiaty	VII	Reguler	TINJAUAN YURIDIS DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP LEGAL STANDING OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA TANPA SURAT KUASA KONSUMEN KEPADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN DALAM PERMA NOMOR 4 TAHUN 2025	Yuridis/Kepustakaan	Dr. Musataklima, S.HI., M.SI	Diterima	Diterima
4	230202110112	Annisa Ilmasari	VII	Reguler	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 3 TAHUN 2026 DALAM PROSEDUR PENATAAN DATA PETANI PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI DESA KEDAWUNGKULON, KECAMATAN GRATI, KABUPATEN PASURUAN)	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris	Akhmad Farroh Hasan, M. Si	DITERIMA DENGAN REVISI, novelty harus diarahkan secara spesifik pada mekanisme baru penataan/sinkronisasi data dan persoalan petani penyewa, bukan sekadar karena regulasinya baru atau lokusnya berbeda. Perbaiki fokus, research gap, novelty, dan redaksi judul agar penelitian tidak menjadi sekadar studi implementasi kebijakan yang deskriptif. saran judul "Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026 dalam Penataan Data Petani Penyewa sebagai Penerima Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Kedawungkulon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan)"	Diterima
5	230202110119	Shely Sindi Nirmala	VII	Reguler	KONSTRUKSI LEGAL STANDING OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM GUGATAN TERHADAP PELAKU USAHA JASA KEUANGAN SYARIAH MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2025	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak, sudah ada tulisan yang membahas tentang legal standing dan kewenangan OJK untuk mengajukan gugatan perdata atas nama/kepentingan konsumen. https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/29055	Ditolak
6	230202110119	Shely Sindi Nirmala	VII	Reguler	KEPASTIAN HUKUM AKAD DALAM TRADISI SOGUKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang)	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, sdh banyak judul yang serupa	Ditolak
7	230202110002	Try Anna Noer Maliya	VII	Reguler	WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN FEE KEPADA PESERTA WEBINAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepustakaan		Ditolak, harus ada data kasus kongkretnya teridentifikasi dengan jelas dalam mini proposal ini.	Ditolak
8	230202110065	Sofiatul Maulana	VII	ICP	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGISIAN SURVEI BERBAYAR PADA APLIKASI POPULIX	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, ada judul yg serupa. https://digilib.uinsgd.ac.id/96936/	Ditolak
9	230202110065	Sofiatul Maulana	VII	ICP	KESESUAIAN PROSES PRODUK HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS TERHADAP SNI 6160: 2022 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI PASAR ORO-ORO DOWO KOTA MALANG)	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris	Dr. Mahbub Ainur Rofiq, M.H	Diterima dengan revisi, harus bisa dibedakan antara ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum dan ketidaksesuaian terhadap standar teknis. maka pertanyaan yg harus dijawab lebih dulu jika judul ini ingin dilanjutkan adalah Apakah SNI 6160:2022 ini wajib diterapkan pada objek penelitian Anda atau sifatnya standar sukarela? Apa dasar hukum yang membuat RPU tersebut wajib tunduk kepadanya?	Diterima
10	230202110147	Marshellia Arthadinofa	VII	Reguler	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK DARK PATTERN PADA MERKETPLACE SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, sudah banyak yang meneliti https://ojs.ummmetro.ac.id/index.php/law/article/view/5281 https://digilib.uinsgd.ac.id/130988/	Ditolak
11	230202110147	Marshellia Arthadinofa	VII	Reguler	PERLINDUNGAN HARTA WAKAF SAHAM DAN KEWENANGAN NAZHIR DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN STATUS EFEK SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepustakaan		DITOLAK.. Tema wakaf saham tetap potensial, tetapi persoalan saham wakaf yang keluar dari DES dan kewenangan nazhir telah diteliti sebelumnya. Cari problem hukum baru yang lahir dari perubahan regulasi pasca-POJK 8 Tahun 2025, bukan mengulang isu keluar dari DES secara umum.	Ditolak
12	230202110030	Putri Alifia Rizki	VII	Reguler	KEPATUHAN HUKUM PELAKU UMKM KULINER TERHADAP KEWAJIBAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQASID SYARIAH (STUDI PADA UMKM KULINER DI DESA JOGOSATRU KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO)	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Tema kepatuhan UMKM terhadap NIB sudah banyak diteliti, termasuk dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto pada UMKM pangan. Data pra-riset juga belum menunjukkan ketidakpatuhan NIB secara spesifik di Desa Jogosatru. Cari problem hukum baru yang muncul dari PP 28 Tahun 2025 dan buktikan terlebih dahulu dengan data pra-riset	Ditolak
13	230202110030	Putri Alifia Rizki	VII	Reguler	EFEKTIVITAS PERIZINAN BERUSAHA MELALUI NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM KULINER PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO DAN MAQASHID SYARIAH (STUDI DI DPMTSP KABUPATEN SIDOARJO)	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, Perubahan lokus ke DPMTSP belum menyelesaikan persoalan novelty. Tunjukkan terlebih dahulu problem konkret pasca PP 28 Tahun 2025 berdasarkan data pra riset DPMTSP bukan mengasumsikan ketidakefektifan dari adanya program sosialisasi/jemput bola. Novelty harus berasal dari problem hukum baru, bukan dari penggabungan teori Soerjono Soekanto dan maqashid syariah	Ditolak
14	230202110139	Muhammad Misbahul Uloom	VII	Reguler	ANALISIS PENERAPAN MERCHANT DISCOUNT RATE (MDR) 0% QRIS BAGI USAHA MIKRO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NOMOR 116/DSN-MUI/X/2017	Yuridis/Kepustakaan		DITERIMA DENGAN REVISI, Novelty masih ada pada konstruksi akad ketika MDR merchant = 0%, tetapi jangan diasumsikan bahwa MDR adalah satu-satunya urjah atau bahwa QRIS identik dengan uang elektronik. Perjelas siapa para pihak, siapa pemberi jasa, siapa penerima jasa, dan dari mana imbalan jasa berasal.	Ditolak (judul Sama)
15	230202110139	Muhammad Misbahul Uloom	VII	Reguler	PENUNDAAN TRANSAKSI REKENING NASABAH ATAS PERMINTAAN APARAT PENEGAK HUKUM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH	Yuridis/Kepustakaan	Aditya Prastian Supriyadi, M.H	DITERIMA DENGAN REVISI, Kegelisahan akademik justru terletak pada konstruksi dasar kewenangan: apakah penundaan dalam kasus ini berjalan berdasarkan Pasal 26 atau Pasal 70 UU TPPU, siapa pejabat yang benewenang memerintahkannya, dan bagaimana hifz al-mal menilai pembatasan sementara terhadap harta untuk kepentingan penegakan hukum	Diterima
16	230202110144	Anastasya Lady Naura Syukroi	VII	Reguler	PEMBATASAN KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KEBUJUKAN EKSPOR SATU PINTU KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH	Yuridis/Kepustakaan		Diterima dengan revisi, Novelty jangan diletakkan hanya pada PP baru atau tambahan maqasid. Titik paling kuat adalah benturan antara kontrak yang telah sah/mengikat dengan rezim ekspor satu pintu yang kemudian mengubah ruang menentukan mitra dan mekanisme transaksi. Fokuskan ke sana	Ditolak (judul Sama)
17	230202110144	Anastasya Lady Naura Syukroi	VII	Reguler	BEBAN PEMBUKTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PRODUK BERBASIS DEEPFAKE ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH	Yuridis/Kepustakaan	Kurniasih Bahagiati, M.H.	Diterima dengan revisi	Diterima
18	230202110055	Annisa Putri Maumi	XII	Reguler	KESADARAN HUKUM NASABAH TERHADAP AKAS PEMBIAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN AKAD PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI BSI KCP MALANG SUKUN)	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris		Ditolak karena tidak tepat menggunakan Kesadaran Hukum karena nasabah adalah konsumen. Mungkin lebih tepat jika menggunakan Pemahaman Hukum namun, judul ini sudah diangkat di beberapa lokasi lainnya	Ditolak
19	230202110114	Indah Sakinah Salsabila	VII	Reguler	MEKANISME BANDING ATAS SANKSI SUSPEND DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN GOJEK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH KOTA MALANG	Empiris/Laporan gan/Yuridis Empiris	Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum	Diterima dengan revisi : apakah data betul-betul dapat diambil dan dengan revisi judul judul - Mekanisme Banding atas Sanksi Suspend dalam Perjanjian Kemitraan Gojek Ditinjau dari Asas Transparansi dan Asas Taswiyah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Malang)	Diterima

20	230202110114	Indah Sakinah Salsabila	VII	Reguler	PENETAPAN BONUS HOST LIVE BERDASARKAN HASIL PENJUALAN PADA ANINDYA COLLECTION PERSPEKTIF AKAD IJARAH DAN JU'ALAH	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak	Ditolak
21	230202110048	Choirina Khilmy Maulidia	VII	Reguler	IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM JAMA'AH UMRAH (STUDI PADA PT NUR HARAMAIN MULIA CABANG MALANG)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, tidak ditemukan problem hukum	Ditolak
22	230202110048	Choirina Khilmy Maulidia	VII	Reguler	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI SISTEM PEMBAYARAN SYAHRIYAH SANTRIWATI PERSPEKTIF MASLAH MURSALAH (STUDI PADA PONDOK PESANTREN DARUZZAHRA AR RIFA'I MALANG)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, tidak ditemukan problem hukum	Ditolak
23	230202110058	Almay Datus Sania Afifah	VII	Reguler	PERSEWAAN VILLA OLEH PASANGAN BUKAN MAHRAM: ANALISIS KEABSAHAN AKAD IJARAH DAN PRINSIP SADD AL-DZARI'AH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, pertama, status penyewa sebagai pasangan yang bukan mahrom bukan berarti secara otomatis pasangan tersebut melakukan perbuatan maksiat. Selain itu, tidak tampak relevansinya dengan keabsahan akad ijarah. Kedua, tidak tampak konstruksi problem hukum ekonomi maupun problem hukum ekonomi syariahnya, apa urgensinya menghukumi sah atau tidaknya padahal tidak mempengaruhi sahnya perjanjian sewa menyewa secara hukum positif. Ketiga, sebenarnya selektor hendak mengusulkan revisi judul yang lebih fokus pada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Persewaan Vila kepada Pasangan Bukan Mahram, namun penelitian semacam ini sudah ada. Keempat, objek penelitian lebih cenderung pada persoalan moral atau sosial masyarakat daripada fiqh/hukum ekonomi syariah	Ditolak
24	230202110047	Maidany Effendy	VII	Reguler	KEABSAHAN TRANSAKSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI DI SOCIAL-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN PERMENDAG NOMOR 19 TAHUN 2026	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, latar belakang belum menunjukkan fokus permasalahan yang jelas. Judul naskah menunjukkan proposal ini tidak fokus, apakah hendak mengkasi keabsahan transaksi atau perlindungan konsumen. Latar belakang dan rumusan masalah bahkan memuat tiga isu yang berbeda yang bahkan bisa saja menjadi tiga judul yang berbeda, yaitu keabsahan transaksi, perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap Permendag terbaru. Masing-masing isu memiliki konstruksi problem hukum yang berbeda.	Ditolak
25	230202110054	Icha Rahma Pangesti	VII	Reguler	Tinjauan Hukum terhadap Kesalahan Pengiriman Barang yang Menguntungkan Konsumen Perspektif Etik Baik dan Etika Bisnis dalam Islam	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, tidak ada problem hukum	Ditolak
26	230202110162	Ellysa Febrianti	VII	Reguler	KESENJANGAN NORMA PENGAWASAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PASCA INTEGRASI NIB DALAM PP NOMOR 28 TAHUN 2025 (ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM)	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, kesenjangan norma pengawasan belum tampak dalam latar belakang. Fokus penelitian juga terlalu luas dan terlalu banyak, sehingga masih belum tampak yang mendalam untuk dikaji.	Ditolak
27	230202110058	Almay Datus Sania Afifah	VII	Reguler	PERSEWAAN VILLA OLEH PASANGAN BUKAN MAHRAM: ANALISIS KEABSAHAN AKAD IJARAH DAN PRINSIP SADD AL-DZARI'AH DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepust akaan		sudah dijawab di atas	Ditolak
28	230202110120	Rizka Oktavia Romadhoni	VII	Reguler	PENERAPAN KETENTUAN JARAK TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, sudah banyak yang membahas	Ditolak
29	230202110120	Rizka Oktavia Romadhoni	VII	Reguler	EFEKTIVITAS PLATFORM ZAKAT DIGITAL DALAM PEMENUHAN MAQASHID SYARIAH : ANALISIS NORMATIF-EMPIRIS DI INDONESIA	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, tidak ada isu hukum	Ditolak
30	230202110071	Muhammad Sakhawi Amin	VII	Reguler	ANALISIS KOMPARATIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA MUHAMMADIYAH TERHADAP KEDUDUKAN ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK AKAD	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, sudah banyak yang membahas	Ditolak
31	230202110071	Muhammad Sakhawi Amin	VII	Reguler	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA NFT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN FIKIH MUAMALAH	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, sudah banyak yang membahas	Ditolak
32	230202110066	Adisti Firdanda Pratiwi	VII	Reguler	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SHAHIBUL MAAL DALAM AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN EKONOMI ISLAM	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, sudah banyak yang membahas	Ditolak
33	230202110036	Risna Eka Safitri	VII	Reguler	ANALISA YURIDIS TERHADAP KENAikan PAJAK PENJUAL (SELLER) YANG DILAKUKAN OLEH SHOPEE TANPA PEMBERITAHAUAN SELLER	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak. Dalam latar belakang, penulis menyebutkan shopee telah memberi pengumuman, meski tidak secara personal. Berarti, klaim 'tanpa pemberitahuan' tidak valid. Isu hukum harus lebih kuat lagi dan jelas.	Ditolak
34	230202110036	Risna Eka Safitri	VII	Reguler	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP OBJEK JAMINAN BANK SYARIAH YANG DILAKUKAN PELELANGAN DI BAWAH NILAI HUTANG	Yuridis/Kepust akaan	Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H	Diterima.	Diterima
35	230202110010	Mohammad Wildan Nur Akbar	VII	Reguler	PENYELESAIAN HAK ATAS HASIL PANEN DALAM AKAD IJARAH LAHAN SAWAH YANG BERAKHIR SEBELUM MASA PANEN PERSPEKTIF HIFZ AL-MAL (STUDI DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANDARKEDEUNGKULO KABUPATEN JOMBANG)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.	Diterima dengan revisi. Permasalahan belum dipaparkan dengan jelas, hasil pra penelitian tidak menjelaskan konkret akibat yang terjadi, hanya menyebutkan "merugikan salah satu pihak". Perjelas lagi latar belakangnya.	Diterima
36	230202110016	FARAH DHIBA AZZAHRO	VII	Reguler	DARK PATTERN DALAM IKLAN DIGITAL: ANALISIS FAKE CLOSE BUTTON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak. Topiknya menarik, namun latar belakang kurang menunjukkan isu hukum. Gali lagi dasar-dasar hukum terkait masalah tsb. Rumusan masalah harus lebih menunjukkan isu hukum.	Ditolak
37	230202110029	Daffa' Asshidqi Dewantara	VII	Reguler	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT (STROBO) DI BUS PARIWISATA (STUDI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Fokus penelitian dalam rumusan masalah kurang jelas dan terlalu meluas. Masalah dari hasil pra penelitian juga belum mewakili lokasi penelitian.	Ditolak
38	230202110069	Shofiyatul Widad	VII	Reguler	ANALISIS KEADILAN DAN TRANSPARANSI PEMBEBANAN BIAYA MARKETPLACE SHOPPE TERHADAP SELLER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Isu hukum kurang kuat.	Ditolak
39	230202110126	Ahmad Nizar Haniri	VII	Reguler	KEABSAHAN JUAL BELI PRODUK TIRUAN (KW) DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK MEREK PERSPEKTIF FIKH MUAMALAH (STUDI DI DESA BALONGMOJO KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Sudah banyak penelitian serupa.	Ditolak
40	230202110008	Wafiqatus Shofiyah	VII	Reguler	ULASAN PRODUK PALSU BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM TRANSAKSI PADA TIKTOK SHOP: ANALISIS TADLIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak. Sudah banyak penelitian serupa.	Ditolak
41	230202110009	Alya Afrillia Masitoh	VII	Reguler	PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MEMBER OLEH PELAKU USAHA SERTA PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG DALAM PENGAWASAN	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Catatan: (1) fokus penelitian kurang jelas, apakah tentang perlindungan hukum atau pengawasan? (2) paparan masalah dari pra penelitian yang terkait dengan lokasi penelitian juga kurang konkret.	Ditolak

42	230202110025	Tri Saputra	VII	Reguler	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR TANPA IZIN DI DESA KELOMPANGGUBUG, KECAMATAN TAMBAK, KABUPATEN GRESIK	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Penelitian serupa sudah banyak sehingga topik kurang memiliki kebaruan.	Ditolak
43	230202110121	Utsman Anwaruzzaman Rafsa	VII	Reguler	PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA NUMANI BAKERY PERSPEKTIF HIFZ AL-NAFS DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Objek penelitian kurang dijelaskan dengan detail. Di mana Numani bakery? Apa alasan memilih Numani Bakery? Seberapa apa usahanya? Berapa karyawannya? dan informasi lain yang dapat menjadi alasan dipilihnya Numani Bakery sebagai lokasi penelitiannya.	Ditolak
44	230202110025	Tri Saputra	VII	Reguler	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR TANPA IZIN DI DESA KELOMPANGGUBUG, KECAMATAN TAMBAK, KABUPATEN GRESIK	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Penelitian serupa sudah banyak dilakukan.	Ditolak
45	230202110076	Muhammad Hakim Baihaqi Ba	VII	Reguler	KEKOSONGAN PENGATURAN CADANGAN EMAS DIGITAL RITEL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, FATWA DSN-MUI DAN AAOIFI STANDAR SYARIAH NO.57	Yuridis/Kepust akaan	Iffaty Nasyiah, M.H	Diterima dengan revisi. Lengkapi latar belakang dengan contoh gap peraturan yang ada dalam Fatwa MUI dan AAOIFI sehingga menjadi alasan untuk membandingkan.	Diterima
46	230202110027	Mohammad Jundub Al Fiar	VII	Reguler	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI QRIS DALAM TRANSAKSI UMKM DI KOTA MALANG (STUDI DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR AREA MALANG)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Isu hukum kurang kuat.	Ditolak
47	230202110073	Ananda Citra Kuswoyo	VII	Reguler	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA JASA PENGIRIMAN DI LUAR APLIKASI (STUDI PADA MITRA PENGEMUDI DAN CUSTOMER LALAMOVE)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak. Sudah ada penelitian yang sama https://repository.uinsaiizu.ac.id/40216/1/Musrifah%20Fathul%20Dinilah%20Tinjauan%20Hukum%20Islam%20Terhadap%20Layanan%20Pengangkutan%20Barang%20Pada%20Aplikasi%20Lalamove%20%28Studi%20Kasus%20di%20Kecamatan%20Bandung%20Kidalu%20Kota%20Bandung%20%29.pdf	Ditolak
48	230202110106	M Zaenul Mutaqin	VII	Reguler	PEMANFAATAN SUPTECH DAN REGTECH DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA: PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGAWASAN SEKTOR KEUANGAN	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak. Fokus penelitian kurang jelas, arahnya ke pencegahan pencucian uang atau perlindungan data pribadi? memang ada kaitannya, namun tidak setara untuk menjadi satu penelitian.	Ditolak
49	2,30202E+11	Rossa Safira Putri Yuwono	VII	Reguler	ANALISIS PEMENUHAN PERSYARATAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS) PADA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DI KOTA MOJOKERTO	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Prof. Dr. Khoiril Hidayah, M.H.	Diterima dengan revisi. Judul disarankan menjadi "Analisis Pemenuhan Persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada Depot Air Minum di Kota Mojokerto" agar lebih sesuai dengan objek yang dibahas dalam proposal. Pada bagian latar belakang, perlu dipadatkan dan lebih difokuskan pada permasalahan pemenuhan SLHS, terutama berdasarkan hasil pra-penelitian mengenai belum dimilikinya SLHS dan dokumen sumber air baku serta kendala biaya, tenaga kerja, dan administrasi. Sumber, waktu, dan objek data pra-penelitian juga perlu diperjelas. Rumusan masalah sudah relevan, tetapi perlu diselaraskan dengan fokus penelitian, yaitu pemenuhan persyaratan SLHS dan kendala dalam pemenuhannya, apabila objek penelitian hanya satu atau beberapa depot tertentu, perlu diperjelas agar tidak terlalu luas. Penelitian terdahulu perlu dipadatkan dan dipilih yang paling relevan dengan SLHS, higiene sanitasi, pengawasan, dan perizinan. Bagian novelty perlu ditegaskan bahwa penelitian ini berfokus pada analisis pemenuhan persyaratan SLHS berdasarkan regulasi yang berlaku serta kendala yang dihadapi oleh depot air minum di Kota Mojokerto. Kalimat pembuka penelitian terdahulu yang tidak sesuai dengan topik mengenai "kesalahan pelaku usaha dalam penyerahan barang" perlu diperbaiki. Dasar hukum perlu diselaraskan kembali dengan regulasi yang digunakan dan diperjelas mana yang menjadi dasar utama penelitian. Daftar pustaka perlu dicocokkan dengan seluruh sumber yang dikutip, dilengkapi identitas referensi yang masih kurang, serta disertakan format penulisannya. Beberapa entri seperti "2014, P. M. (n.d.)", "2023, P. N. (n.d.)", dan "Resiko, P. P. (n.d.)" perlu diperbaiki agar identitas sumber dapat diketahui dengan jelas.	Diterima
50	230202110095	Abre Ratu Wafa	VII	Reguler	TAQLID DAN ITIBA' DALAM MENENTUKAN HUKUM CRYPTOCURRENCY: PERSPEKTIF USHUL FIQH TERHADAP SIKAPMAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, karena Judul Kedua sudah diterima.	Ditolak
51	230202110095	Abre Ratu Wafa	VII	Reguler	IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA BAZNAS KOTA MALANG)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Prof. Dr. H. Fakhruddin, M.HI	Diterima.	Diterima
52	230202110155	Relis Anggun Salsabila	VII	Reguler	KETIDAKPASTIAN HUKUM KATEGORI LAYANAN PENUNJANG OPERASIONAL DALAM PERMENAKER NOMOR 7 TAHUN 2026 PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH	Yuridis/Kepust akaan	Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H	Diterima dengan revisi. Judul dapat dipertahankan, tetapi perlu disesuaikan agar konsisten dengan fokus pembahasan, yaitu "Ketidakpastian Hukum Kategori Layanan Penunjang Operasional dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah". Pastikan istilah "layanan penunjang operasional" digunakan secara konsisten, karena pada rumusan masalah masih terdapat penggunaan istilah "layanan operasional". Pada bagian latar belakang, uraian perlu dipadatkan dan lebih difokuskan pada persoalan ketidakjelasan batas kategori "layanan penunjang operasional" dalam Pasal 3 ayat (2) Permenaker Nomor 7 Tahun 2026. Perlu diperjelas hubungan antara Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, terbitnya Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, dan munculnya persoalan kepastian hukum. Pendapat pihak-pihak yang mengkritisi aturan tersebut sebaiknya tetap disampaikan sebagai pendapat yang bersumber dan tidak langsung dijadikan kesimpulan peneliti. Rumusan masalah perlu diselaraskan dengan judul dan dibuat lebih tajam, terutama dengan membedakan antara pengaturan kategori layanan penunjang operasional dan analisis kepastian hukumnya dalam perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. Disarankan rumusan masalah diarahkan pada: (1) Bagaimana pengaturan kategori layanan penunjang operasional dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2026? (2) Bagaimana kepastian hukum kategori layanan penunjang operasional tersebut ditinjau dari perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Pada bagian penelitian terdahulu, referensi sudah cukup relevan dan banyak yang membahas outsourcing, Putusan MK, perlindungan pekerja, serta Sadd Adz-Dzari'ah. Namun, perlu diteliti dan ditegaskan novelty yang kebaruan.	Diterima
53	210202110051	Rifda Kamila	XI	Reguler	KEKOSONGAN NORMA HUKUM DALAM TRANSAKSI ZAKAT DIGITAL MELALUI MULTI-TIER PAYMENT SYSTEM DI PLATFORM MITRA BAZNAS RI PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, karena Judul Kedua sudah diterima dengan revisi.	Ditolak

54	210202110051	Rifda Kamila	XI	Reguler	TRANSPARANSI INFORMASI DAN KERELAAN KONSUMEN DALAM AKAD JUAL BELI MELALUI LIVE SHOPPING PADA PLATFORM TIKTOK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepust akaan	Dr. Mahbub Ainur Rofiq, M.H	Diterima dengan revisi: Judul dapat dipertahankan, yaitu "Transparansi Informasi dan Kerelaan Konsumen dalam Akad Jual Beli melalui Live Shopping pada Platform TikTok dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", karena sudah menunjukkan objek, fenomena, dan perspektif penelitian dengan cukup jelas. Pada bagian latar belakang, perlu dipadatkan dan lebih difokuskan pada hubungan antara transparansi informasi dalam live shopping dengan terbentuknya kerelaan (al-tarāḍīn) konsumen. Perlu diperjelas indikator informasi yang menjadi objek kajian, seperti kondisi dan spesifikasi produk, harga dan promo, stok, cacat barang, serta informasi terkait retur. Rumusan masalah sudah relevan, tetapi perlu dibuat lebih sederhana dan konsisten dengan fokus penelitian, yaitu praktik transparansi informasi, proses terbentuknya kerelaan konsumen, dan analisis keterkaitannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Batasan masalah juga perlu dipertahankan agar penelitian tidak terlalu luas, terutama dalam menentukan subjek yang akan diwawancarai dan jenis transaksi live shopping yang menjadi objek penelitian. Penelitian terdahulu sudah cukup banyak dan relevan, tetapi perlu dipadatkan dan diperjelas research gap serta novelty-nya. Kebaruan perlu ditegaskan pada kajian mengenai hubungan transparansi informasi yang disampaikan selama proses live shopping dengan terbentuknya kerelaan konsumen sebelum akad, karena penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan konsumen, tadlis, gharar, khiyar, atau transaksi TikTok secara umum. Kerangka teori perlu diselaraskan agar tidak terlalu banyak konsep yang digunakan; prioritaskan akad jual beli, prinsip al-tarāḍīn, transparansi informasi, tadlis, gharar, khiyar, dan khiyar.	Diterima
55	230202110124	Fatma Nurul Rokhimah	VII	Reguler	KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) KULINER TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2024 (STUDI DI KECAMATAN PLAOSAN, KABUPATEN MAGETAN)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		Ditolak, karena Judul Kedua sudah diterima dengan revisi.	Ditolak
56	230202110124	Fatma Nurul Rokhimah	VII	Reguler	KLAUSUL BAKU VIDEO UNBOXING SEBAGAI SYARAT PENGEMBALIAN BARANG DALAM E-COMMERCE: ANALISIS SYARATHUN FASID TERHADAP HAK KHIYAR 'AIB	Yuridis/Kepust akaan	Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI	Diterima dengan revisi. Latar belakang perlu diperkuat dengan memperjelas persoalan hukum mengenai kewajiban video unboxing sebagai syarat pengembalian barang, khususnya kaitannya dengan hak konsumen ketika barang yang diterima ternyata cacat. Analisis terhadap Pasal 18 UUPK perlu diperdalam dengan menjelaskan terlebih dahulu karakter klausul unboxing dan akibat hukumnya, sehingga tidak langsung menyimpulkan bahwa klausul tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen. Konsep syarathun fasid perlu diperjelas meliputi pengertian, dasar hukum, kriteria, dan akibat hukumnya, kemudian dikaitkan secara langsung dengan klausul video unboxing. Hubungan antara syarathun fasid dan khiyar 'aib juga perlu diperjelas, terutama mengenai kedudukan hak pembeli apabila tidak memiliki video unboxing tetapi dapat membuktikan adanya cacat barang melalui bukti lain. Penelitian terdahulu perlu dipadatkan dan research gap serta novelty lebih ditegaskan, yaitu analisis klausul video unboxing sebagai syarat pengembalian barang melalui perspektif syarathun fasid serta implikasinya terhadap hak khiyar 'aib. Selain itu, tabel penelitian terdahulu, sitasi, dan Daftar Pustaka perlu dirapikan serta diseragamkan, termasuk konsistensi penulisan istilah Arab seperti syarathun fasid dan khiyar 'aib.	Diterima
57	230202110170	Serli Agustin	VII	Reguler	TINJAUAN DOKTRIN KEADAAN MEMAKSA TERHADAP KLAUSULA BAKU 'DOWN PAYMENT (DP) HANGUS AKIBAT MUSIBAH PADA PERJANJIAN OPEN TRIP WISATA	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, karena Judul Kedua sudah diterima.	Ditolak
58	230202110170	Serli Agustin	VII	Reguler	PENYELESAIAN KEBAKARAN TEBU AKIBAT KELALAIAN PIHAK KETIGA OLEH LMDH DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Iffaty Nasyiah, M.H	Diterima dengan revisi: Judul perlu diperjelas kembali, terutama hubungan antara LMDH sebagai pihak yang mengelola/menaungi petani penggarap dengan pihak ketiga sebagai pihak yang menyebabkan kebakaran, agar tidak menimbulkan kesan bahwa LMDH merupakan pihak yang melakukan kelalaian. Latar belakang sudah memiliki fenomena yang konkret mengenai kebakaran lahan tebu di kawasan Perhutani dan kerugian petani, tetapi perlu lebih difokuskan pada kasus yang menjadi objek penelitian di Desa Kalipare, termasuk kronologi kejadian, bentuk kerugian, pihak yang terlibat, serta upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Pernyataan mengenai kelalaian pihak ketiga perlu didukung dengan data atau keterangan yang memadai dan tidak langsung menyimpulkan adanya tanggung jawab sebelum unsur kelalaian, kerugian, dan hubungan kausalitas dapat dibuktikan. Dasar hukum Pasal 1365 KUHP-Perdata, Pasal 88 UU PPLH, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta konsep dhaman, dhaman al-taf, dan mas'uliyah taqsiriyah perlu dipetakan secara lebih sistematis agar jelas relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Rumusan masalah sudah cukup fokus, tetapi perlu disiapkan konsisten dengan fenomena yang diangkat, khususnya mengenai pertanggungjawaban ganti rugi dan penyelesaian kerugian ketika pihak yang lalai sulit dibuktikan. Penelitian terdahulu sudah cukup banyak, tetapi perlu dipadatkan dan diarahkan pada penelitian yang benar-benar relevan dengan kebakaran lahan, petani penggarap Perhutani, ganti rugi, kelalaian pihak ketiga, dan konsep dhaman. Novelty perlu ditegaskan secara sederhana, yaitu pada kajian mengenai penyelesaian kerugian tanaman tebu dengan penyesuaian akibat kebakaran yang disebabkan oleh pihak ketiga.	Diterima
59	220202110057	Muhammad Salman Alfariis	IX	Reguler	ANALISIS KESESUAIAN PELAKSANAAN PRINSIP KEANGGOTAAN SUKARELA PADA KOPERASI DESA MERAH PUTIH DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN (STUDI DI Desa Sumber Agung Kecamatan Selojore Kabupaten Blitar).	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.	Diterima dengan revisi: Judul dapat dipertahankan karena telah memuat objek, lokasi, prinsip yang dikaji, dan dasar hukum yang jelas, tetapi peneliti perlu memastikan bahwa fokus penelitian benar-benar terbatas pada prinsip keanggotaan sukarela pada Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sumber Agung. Latar belakang perlu dipadatkan dan lebih difokuskan pada permasalahan utama, khususnya hasil pra-penelitian yang menunjukkan adanya anggota yang merasa terpaksa menjadi anggota koperasi. Temuan tersebut perlu dijelaskan lebih konkret mengenai proses keanggotaan, pihak yang menentukan atau mengusulkan anggota, serta bentuk keterpaksaan yang terjadi, dengan tetap menggunakan istilah indikasi dan tidak langsung menyimpulkan adanya pelanggaran hukum sebelum dibuktikan melalui penelitian. Dasar hukum berupa UU Nomor 25 Tahun 1992 perlu diperjelas keterkaitannya dengan prinsip keanggotaan sukarela sehingga dapat terfiliat perbandingan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Rumusan masalah perlu diselaraskan dengan judul dan dapat difokuskan pada pelaksanaan prinsip keanggotaan sukarela serta kesesuaiannya dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian terdahulu perlu dipadatkan dengan memilih sumber yang paling relevan dan mempertegas novelty, yaitu penelitian secara khusus mengkaji kesesuaian pelaksanaan prinsip keanggotaan sukarela pada Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sumber Agung dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992, bukan hanya membahas pembentukan, tata kelola, partisipasi, atau kebijakan Koperasi Desa Merah Putih secara umum. Daftar pustaka perlu diperiksa kembali kesesuaian antara sumber yang dikutip dengan yang tercantum dalam daftar pustaka, melengkapinya.	Diterima

60	230202110086	Muhammad Raindra Farizki	VII	Reguler	Analisis Yuridis Potensi Konversi Kopdes Merah Putih menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah sebagai Alternatif Pemberantasan Rentenir	Yuridis/Kepust akaan	Prof. Dr. H. Fakhruddin, M.HI	Diterima dengan revisi. Judul sudah cukup menarik dan aktual, tetapi perlu dipertajam terutama pada frasa "potensi konversi" dan "sebagai alternatif pemberantasan rentenir", agar jelas apakah penelitian berfokus pada kemungkinan konversi secara yuridis atau pada kedudukan konversi sebagai alternatif pembiayaan syariah dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Latar belakang perlu dipadatkan dan diarahkan pada persoalan hukum yang spesifik, yaitu kedudukan Kopdes Merah Putih sebagai koperasi yang memiliki unit simpan pinjam, kemudian kemungkinan dan dasar hukum konversinya menuju koperasi simpan pinjam/pembiayaan syariah. Perlu juga dibedakan secara jelas antara Kopdes Merah Putih, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) agar istilah yang digunakan konsisten. Rumusan masalah perlu dipertajam, terutama rumusan ketiga mengenai "efektivitas", karena penelitian yang diajukan lebih menonjolkan analisis yuridis normatif; istilah tersebut dapat dipertimbangkan untuk diganti dengan rumusan yang lebih sesuai, misalnya mengenai potensi atau kedudukan konversi sebagai alternatif pembiayaan syariah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Penelitian terdahulu sudah cukup banyak, tetapi tabelnya perlu dipadatkan dengan memilih penelitian yang paling relevan. Research gap dan novelty juga perlu dibuat lebih hati-hati, karena pernyataan bahwa belum ada penelitian mengenai Kopdes Merah Putih perlu didukung dengan penelusuran yang memadai; kebenaran sebaiknya ditegaskan pada analisis yuridis terhadap kemungkinan konversi Kopdes Merah Putih menjadi koperasi syariah dalam konteks program	Diterima
61	230202110086	Muhammad Raindra Farizki	VII	Reguler	Analisis Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Halal Value Chain Berbasis Digital pada UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Yuridis/Kepust akaan		Ditolak, karena Judul Pertama sudah diterima dengan revisi.	Ditolak
62	230202110151	Moh. Randy Ferdiansyah	VII	Reguler	TANGGUNG JAWAB HUKUM PRODUSEN OBAT TRADISIONAL PASCA 42 TAHUN 2024	Yuridis/Kepust akaan	Rizka Amaliah, M.Pd.	Diterima dengan revisi. Judul perlu ditinjau kembali, khususnya penggunaan istilah "Pasca PP Nomor 42 Tahun 2024", karena latar belakang menjelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan memasuki tahap wajib setelah berakhirnya masa penahanan pada 17 Oktober 2026. Selain itu, objek penelitian harus dibuat konsisten, karena judul berfokus pada produsen obat tradisional, sedangkan latar belakang juga membahas obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Latar belakang perlu dipadatkan dengan lebih menonjolkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab produsen yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan perlindungan konsumen, serta menghindari kesimpulan normatif sebelum dilakukan analisis. Rumusan masalah sudah relevan, tetapi perlu diselaraskan kembali dengan judul dan batasan objek penelitian. Penelitian terdahulu sudah cukup banyak, namun research gap dan novelty perlu dipertajam agar terlihat secara jelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian mengenai sertifikasi halal pada produk obat yang telah ada, terutama dari sisi perubahan regulasi setelah PP Nomor 42 Tahun 2024. Dasar hukum yang digunakan juga perlu dipetakan secara sistematis, terutama hubungan antara UU Jaminan Produk Halal, PP Nomor 42 Tahun 2024, dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Daftar Pustaka belum dicantumkan dalam proposal sehingga wajib dilengkapi, dengan memasukkan seluruh sumber yang dikutip dalam naskah, baik peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun sumber resmi daring, serta memastikan konsistensi antara kutipan dalam teks dan Daftar Pustaka	Diterima
63	230202110156	Nur Afifah	VII	Reguler	PERGESERAN PRAKTIK MUZARA'AH KE AKAD IJARAH DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI DESA SAWAHAN KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF KOMPLIASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)	Yuridis/Kepust akaan	Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum	Diterima dengan revisi. Judul dapat dipertahankan, namun peneliti perlu memastikan bahwa fenomena pergeseran praktik muzara'ah ke akad ijarah benar-benar ditemukan di Desa Sawahan dan konsisten dengan praktik yang akan diteliti. Pada bagian latar belakang, perlu diperkuat data awal mengenai bagaimana praktik muzara'ah sebelumnya dilakukan, bagaimana praktik ijarah yang berlangsung saat ini, serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran tersebut. Data mengenai penyusutan lahan dan produksi pertanian cukup digunakan sebagai data pendukung. Hindari kesimpulan bahwa pergeseran tersebut merugikan penggarap atau bertentangan dengan prinsip syariah sebelum dibuktikan melalui penelitian. Rumusan masalah perlu disesuaikan dengan judul dan perspektif KHES dengan menambahkan aspek tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pergeseran tersebut. Penelitian terdahulu perlu dipadatkan dan lebih ditegaskan novelty-nya, yaitu mengkaji proses pergeseran akad muzara'ah ke ijarah, faktor yang melatarbelakanginya, serta tinjauannya berdasarkan KHES. Daftar pustaka perlu dirapikan dan dilengkapi, khususnya referensi yang identitasnya belum jelas atau masih tertulis "No Title", serta disesuaikan antara sumber yang dikutip dengan yang tercantum dalam daftar pustaka.	Diterima
64	230202110064	Ananda Amalia Efendi	VII	Reguler	PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SUPPLY ROLL KARET DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA PABRIK MILMAN RUBBER ROLL MALANG)	Yuridis/Kepust akaan	Dr. Musatakim, S.HI., M.SI	Diterima dengan revisi. Judul disarankan menjadi "Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Istishna' pada Transaksi Supply Roll Karet di Pabrik Milman Rubber Roll Malang" agar lebih konsisten dengan fokus akad istishna' yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian latar belakang, perlu dipadatkan dan difokuskan pada permasalahan utama, yaitu ketidaksesuaian spesifikasi barang dan keterlambatan pembayaran, serta memperjelas sumber dan periode data pra-survei. Rumusan masalah perlu disederhanakan menjadi fokus pada praktik akad istishna', bentuk wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian terdahulu perlu dipertajam dengan menegaskan novelty penelitian, khususnya fokus pada wanprestasi dalam transaksi supply roll karet di lingkungan pabrik dan mekanisme penyelesaiannya. Daftar pustaka perlu disesuaikan kembali dengan sumber yang dikutip dalam naskah, dilengkapi apabila masih terdapat referensi yang belum lengkap, serta diseragamkan format penulisan dan istilah istishna'/istishna'.	Diterima
65	230202110064	Ananda Amalia Efendi	VII	Reguler	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI CLICKBAIT DALAM ENDORSEMENT PROPERTI (STUDI KASUS PROMOSI VILLA DI KOTA BATU MELALUI MEDIA SOSIAL)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		ditolak, tidak ada isu hukum di dalamnya, persoalan yang diangkat hanya membahas klikbait tanpa mengaitkannya dengan konteks villa di batu	Ditolak
66	230202110061	Amelia Dea Divanda	VII	Reguler	DIGITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DI UPZ MASJID JAMIK BANGIL DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Akhmad Farroh Hasan, M. Si	diterima dengan revisi: penelitian ini seharusnya diarahkan pada penelitian tentang asas hukum pengelolaan zakat, khususnya terkait akuntabilitas	Diterima
67	220202110035	Ahmad Rozak Prakosa	IX	Reguler	PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN: STUDI INDONESIA DAN UNI EROPA	Yuridis/Kepust akaan		ditolak, karena Indonesia tidak secara implisit melakukan perlindungan terhadap penyintas Deepfake	Ditolak
68	220202110035	Ahmad Rozak Prakosa	IX	Reguler	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL TERHADAP PEMANFAATAN TOPENG MALANGAN : STUDI KASUS DI PADEPOKAN SENI MANGUN DHARMA	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	KHOIRUL HIDAYAH	diterima	Diterima

69	230202110092	Fathimah Nurul Maula	VII	Reguler	KEABSAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA AKIBAT PELANGGARAN DITINJAU DARI KETENTUAN SURAT PERINGATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 61/PDT.SUS-PHI/2025/PN BDG)	Yuridis/Kepust akaan	Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H	diterima	Diterima
70	230202110078	Shira Adisa Aziz	VII	ICP	KEDUDUKAN HAK ATAS FONT DIGITAL SEBAGAI MAL DAN DAMAN ATAS PENGGUNAAN TANPA IZIN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Analisis Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Wat jo. 183/PID.SUS/2025/PT YYY jo. 6755 K/Pid.Sus/2026)	Yuridis/Kepust akaan	Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI	diterima	Diterima
71	230202110017	Vika Widowati	VII	ICP	PENGGAANDAN REKAMAN SIARAN DAN HAK EKONOMI PENCIPTA PERSPEKTIF UU HAK CIPTA DAN MAQASID AL SYARIAH (Studi Putusan Mahkamah Agung 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2023)	Yuridis/Kepust akaan	Dr. Ramadhita, M.HI	diterima	Diterima
72	230202110078	Shira Adisa Aziz	VII	ICP	PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA HAK CIPTA PERSPEKTIF TAZIR DALAM FIKIH JINAYAH (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2025/PN Wat jo. 183/PID.SUS/2025/PT YYY jo. 6755 K/Pid.Sus/2026)	Yuridis/Kepust akaan		ditolak	Ditolak
73	230202110171	Bella Chusnul Chotimah	VII	Reguler	ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP VISIBILITAS INFORMASI PRODUK PIA FENTY OLEH-OLEH KHAS JOMBANG: STUDI KEPATUHAN TERHADAP UNDANG UNDANG NO.7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN ETIKA BISNIS ISLAM	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H	diterima	Diterima
74	220202110027	Fadila Maulida Syafira	IX	Reguler	BATASAN HAK KEPEMILIKAN (MILKIYAH) ATAS DANA KEKELIRUAN TRANSFER PERBANKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS PUTUSAN SENGKETA NASABAH VS BANK)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		ditolak	Ditolak
75	220202110027	Fadila Maulida Syafira	IX	Reguler	TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT PELANGGARAN SOP DALAM AKAD WAKALAH (STUDI KASUS PENIPUAN OTOMOTIF DI SURABAYA)	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Iffaty Nasyiah, M.H	diterima	Diterima
76	220202110104	Najla Anisa	IX	Reguler	ANALISIS TATA KELOLA OPERASIONAL DAN KETERGANTUNGAN EKSTERNAL PADA KOPERASI DESA MERAH PUTIH DESA POHGAJIH	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris	Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.	diterima	Diterima
77	230202110014	Moh. Nurul Azmi	VII	ICP	IMPLEMENTASI OSS-RBA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA DITINJAU DARI HUKUM PERUSAHAAN DAN MASLAHAH MURSALAH: STUDI KASUS PAUD KB PERMATA BUNDA	Empiris/Lapan gan/Yuridis Empiris		ditolak, tidak ada isu hukum	Ditolak
78	230202110014	Moh. Nurul Azmi	VII	ICP	ANALISIS HUKUM ATAS PENETAPAN HARGA LIMIT LELANG AGUNAN DEBITUR TERDAMPAK PANDEMI STUDI PUTUSAN PN SITUBONDO NOMOR 25/PDT.G/2025/PN SIT	Yuridis/Kepust akaan	Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H	diterima	Diterima
79	230202110075	Ikhza Nabil Hazim	VII	Reguler	PERAN DISKOP UKM DIY DALAM PERLINDUNGAN HUKUMUMKM KULINER dan SENGKETA ULASAN DIGITAL INFULENCER	Yuridis/Kepust akaan	Aditya Prastian Supriyadi, M.H	diterima	Diterima
80	19220092	Nauval Ulii Abshor	XV	Reguler	KONSTRUKSI HUKUM RESTOCKING FEE SEBAGAI POTONGAN DANA PENGEMBALIAN JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Yuridis/Kepust akaan		ditolak sudah banyak kajian serupa https://repository.radenintan.ac.id/38234/1/PUSAT%201%202%20FITRIA.pdf	Ditolak